

---

**PENGARUH APBN, PRODUK DOMESTIK BRUTO DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP ANGGARAN PERTAHANAN T.A 2010-2020****Oleh****Korinti Venesia Pandia<sup>1)</sup>, Yudi Sutrasna<sup>2)</sup>, Djoko Andreas Navalino<sup>3)</sup>****<sup>1,2,3</sup>Prodi Ekonomi Pertahanan-Fakultas Manajemen Pertahanan UNHAN RI.****Jl. Salemba No.14 Jakarta Pusat****Email: [1korintivenesia@gmail.com](mailto:1korintivenesia@gmail.com)****Abstrak**

Perang ekonomi yang saat terjadi antara negara negara kuat seperti Amerika dan China berdampak luas ke berbagai negara termasuk Indonesia. Penelitian ini bertujuan meneliti bagaimana Pengaruh APBN, Produk Domestik Bruto dan Pertumbuhan Ekonomi, Terhadap Anggaran Pertahanan Tahun 2010-2020. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dari sisi pertumbuhan ekonomi, terdapat pertentangan baik dari hasil estimasi maupun teori., dimana berdasarkan hasil estimasi pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap anggaran pertahanan. Aliran keynesian berpandangan bahwa meningkatnya pengeluaran pemerintah akan mendorong peningkatan permintaan berbagai barang dan jasa yang diproduksi perekonomian secara agregat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, belanja negara termasuk di dalamnya belanja pertahanan menjadi salah satu alat kebijakan yang penting dan ideal digunakan oleh pemerintah dalam upaya menciptakan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

**Kata Kunci: Ancaman, APBN, PDB, Pertumbuhan, Ekonomi Pertahanan****PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai negara terbuka, tidak akan terlepas dari pengaruh perkembangan global dan regional. Stabilitas keamanan lingkungan strategis menjadi bagian kepentingan nasional Indonesia sehingga Indonesia berkepentingan untuk mencermati perkembangan situasi yang mengancam perdamaian dunia dan stabilitas regional agar dapat mengambil langkah-langkah yang tepat. Hukum dasar tertulis Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan Negara secara resmi dimuat dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Hal-hal yang sangat fundamental dan secara konstitusional melandasi Doktrin Pertahanan Negara yang dimuat dalam Pembukaan UUD 1945. Pada pembukaan, tertuang prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pertahanan Negara yang dijiwai oleh Pancasila, yaitu “Bangsa Indonesia pada hakikatnya cinta

damai tetapi lebih mencintai kemerdekaan serta kedaulatannya”. Selanjutnya Pada alinea II juga diamanatkan Cita-cita Nasional Bangsa Indonesia yaitu “Terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”(Dipua, 2021). Indonesia menyadari bahwa keamanan nasionalnya menjadi bagian dari kepentingan strategis negara-negara lain. Isu keamanan domestik yang muncul juga dipengaruhi oleh factor eksternal dan internal yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan nasional. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah dampak heterogenitas suku bangsa Indonesia, situasi ekonomi yang menyebabkan beban hidup semakin berat, serta faktor politik dan sosial (Prakoso, 2021).

Berangkat dari kenyataan tersebut, upaya pertahanan tidak hanya mengacu pada isu keamanan tradisional, yakni invasi atau agresi dari negara lain, tetapi juga pada isu keamanan

nontradisional, yaitu setiap aksi yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka upaya suatu negara menyelenggarakan pertahanan negara maka hal yang menjadi tolak ukur adalah daya dukung atau besaran anggaran pertahanan suatu negara yang merupakan bagian dari anggaran belanja negara. Secara hakekatnya, anggaran adalah sebuah bentuk kebijakan pemerintah yang tertuang dalam besaran angka dan berlaku dalam jangka waktu tertentu. Anggaran pertahanan merupakan tolak ukur yang digunakan untuk melihat kemampuan dan kebijakan negara dalam menyikapi sistem pertahanan yang digunakan serta untuk melihat sumber daya yang diberikan oleh negara kepada angkatan bersenjata, dan komitmen Negara dalam pengelolaan dan peningkatan kapabilitas pertahanan (Suhirwan (2020).

Salah satu isu yang paling melemahkan pertumbuhan ekonomi dunia adalah perang dagang. Perang dagang antar negara menimbulkan ketegangan perdagangan tidak hanya memicu pelemahan perdagangan barang dunia, namun juga berdampak pada aktivitas ekonomi lainnya seperti sektor jasa dan pasar tenaga kerja. Kondisi ini semakin mengonfirmasi pelemahan ekonomi yang meluas ke negara yang tidak hanya ditopang oleh sector industri, namun juga ke negara yang ditopang oleh sektor jasa. Kemudian perkembangan ketegangan hubungan perdagangan antara yang masih terus berlanjut mengakibatkan penekanan ekonomi AS dan Tiongkok sehingga berada pada lintasan melambat (Prihantoro, 2020). Perlambatan ekonomi di Amerika Serikat juga terjadi akibat dari mulai berkurangnya dampak stimulus fiskal sejak tahun 2018. Sementara itu, Tiongkok tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan kondisi satu dekade sebelumnya sebagai konsekuensi dari kebijakan rebalancing ekonomi dan deleveraging sistem finansial. Ketegangan perdagangan pada akhirnya

memukul aktivitas perdagangan serta investasi kedua negara. Terkhusus Indonesia, dengan berbagai fenomena dan perkembangan yang terjadi pada perekonomian global, sudah pasti memberi dampak kepada perekonomian Indonesia.

Berdasarkan fenomena dan penelitian terdahulu yang telah dilakukan, pada penelitian ini akan diteliti bagaimana Pengaruh APBN, Produk Domestik Bruto dan Pertumbuhan Ekonomi, Terhadap Anggaran Pertahanan Tahun 2010-2020.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah suatu cara dalam suatu penelitian guna memahami suatu objek penelitian yang akan memandu peneliti dalam urutan penelitian yang dilakukan baik dalam bentuk teknik ataupun prosedur yang digunakan dalam penelitian. Sugiyono (2006) menyatakan bahwa metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga pada akhirnya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.” Metode penelitian menggunakan cara ilmiah untuk menghasilkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dan cara ilmiah yang dimaksud adalah berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris dan sistematis.

Suatu penelitian dapat diklasifikasikan dari berbagai pendekatan. Jika ditinjau dari pendekatan analisis, penelitian terdiri dari dua macam yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berlandaskan pada filsafat positivisme dengan menggunakan metode analisis data secara kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan menekankan analisis pada data-data numerical (angka-angka) mulai dari pengumpulan data hingga pada hasilnya. Tujuan penggunaan metode ini adalah untuk saling mendukung hasil analisis dengan menguji hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya (Sugiyono, 2011).

Adapun analisis deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian namun tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang luas (Sugiyono, 2011). Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan obyek penelitian/data atau variabel penelitian secara komprehensif serta pemecahan masalah dengan cara menggambarkan atau menjelaskan keadaan obyek penelitian/data atau variabel penelitian yang sifatnya aktual secara kajian teoritis maupun fakta empiris yang sifatnya menjelaskan secara uraian dalam bentuk kalimat, kemudian di dukung pada hasil analisis data yang diolah dengan analisis kuantitatif. Secara ringkas, fungsi daripada metode deskriptif secara ringkas adalah untuk menganalisis guna mencari hubungan, kaitan, dan pengaruh antara variabel yang satu dengan variabel yang lain.

Adapun hipotesis dalam penelitian ini akan diuji dengan menggunakan pendekatan deskriptif dimana pengujian akan dilakukan secara terukur sehingga dapat diperoleh parameter dari pengaruh perubahan suatu variable ekonomi terhadap perubahan variabel ekonomi yang lain yang dapat dijelaskan dengan asumsi ilmu ekonomi (Muhammad: 2005 dalam Putri, 2020). Pendekatan deskriptif digunakan untuk menginterpretasikan hasil pengujian kuantitatif yang nantinya akan menjawab hipotesis dari penelitian yang dilakukan.

Analisis kuantitatif dalam penelitian ini akan menggunakan metode penelitian Regresi Linear Berganda (Ordinary Last Square) dengan uji klasik untuk mengetahui besar pengaruh masing-masing variabel terikat terhadap variabel bebas dengan bantuan program komputer dengan aplikasi Eviews.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil estimasi dengan menggunakan metode Ordinary Last Square yang sudah dilakukan pada penelitian ini dapat diketahui bagaimana hubungan variabilitas yang

mempengaruhi kenaikan Anggaran Pertahanan. Adapun perbandingan dengan penelitian terdahulu yaitu, penelitian Saadet Deger and Somnath Sen berjudul "*Military Expenditure And Developing Countries*" (1995) dalam penelitian menyatakan bahwa untuk memahami sifat pengeluaran militer terutama di negara berkembang, maka harus melampaui bidang ekonomi. Adapun bidang ekonomi yang dimaksud adalah pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pertahanan, keamanan serta pengembangan. Penelitian ini menghasilkan bahwa tingkat pembangunan ekonomi, yang diberikan oleh ukuran standar pendapatan per kapita, tidak berpengaruh atau kontradiktif terhadap anggaran belanja militer.

Dalam penelitian Dogan dan Cheong (2006) mengenai Pengeluaran Pemerintah dan Pendapatan Nasional: Uji Kausalitas Untuk Lima Negara Asia Tenggara (*Government Expenditure And National Income: Causality Tests For Five South East Asian Countries*). Peneliti menggunakan metode kointegrasi Johansen-Juselius untuk mendeteksi hubungan jangka panjang antara pendapatan nasional per kapita riil dan pengeluaran pemerintah per kapita riil di semua negara sampel dan metodologi yang dikembangkan oleh Granger untuk menguji dua hipotesis. Hasil uji kausalitas Granger menunjukkan bahwa tidak ada hubungan sebab akibat dari pendapatan per kapita riil ke pengeluaran pemerintah pengeluaran pemerintah tidak memainkan peran yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di empat negara dalam studi

Pieroni (2007) dalam penelitiannya mengamati bagaimana pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh penting terhadap laju pertumbuhan jangka panjang. peneliti menemukan hubungan negatif yang lemah antara bagian pengeluaran militer dan pertumbuhan ekonomi. negara-negara dengan beban militer yang lebih rendah menunjukkan hubungan yang tidak signifikan antara beban militer dan pertumbuhan dengan estimasi

nonparametrik yang mendekati analisis parametrik. Sebagai kesimpulan, hasil tersebut mengkonfirmasi bahwa hubungan antara pengeluaran militer dan pertumbuhan mungkin mengandung nonlinier selain yang dihipotesiskan.

Avatara (2013) dalam penelitiannya mengenai pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh Penerimaan Perpajakan, Utang Pemerintah Indonesia, Belanja Modal, dan Kebijakan Otonomi Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi. Hasil analisis data menunjukkan bahwa Penerimaan Perpajakan, Utang Pemerintah Indonesia, Belanja Modal dan Kebijakan Otonomi Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDB) di Indonesia tahun 1992 – 2011 di kaji dari sisi fiskal. Secara parsial, Penerimaan perpajakan, Utang Pemerintah Indonesia, Belanja Modal dan Kebijakan Otonomi Daerah berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDB) di Indonesia tahun 1992 – 2011. Secara parsial, variable Penerimaan Perpajakan (T), Utang Pemerintah Indonesia (UPI), Belanja Modal (BM) dan Kebijakan Otonomi Daerah (DUM) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia (PDB). Penerimaan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (PDB), Utang pemerintah Indonesia (UPI) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (PDB), pengaruh variabel Belanja Modal (BM) terhadap pertumbuhan ekonomi (PDB) di Indonesia menunjukkan angka yang signifikan. Pada bagian diskusi ini akan dijelaskan hasil analisis data yang telah dilakukan sebelumnya. Secara umum, variabel yang mempengaruhi Anggaran Pertahanan di Indonesia adalah variabel APBN, PDB dan Pertumbuhan Ekonomi.

### **Pengaruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Terhadap Anggaran Pertahanan**

Berdasarkan pada hasil estimasi secara parsial untuk menjawab pertanyaan empiris

terhadap penelitian variabel Anggaran Pertahanan

tahun 2010-2020 bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara memiliki pengaruh memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Anggaran Pertahanan. Hasil estimasi ini sesuai dengan hipotesis awal yang dibuktikan dengan probabilitas t-hitung sebesar  $0.0201 < \alpha, 0.0201 < 0.05$ .

Anggaran penerimaan belanja negara merupakan urat nadi bagi suatu negara dalam menjalankan pemerintahan. Menurut Robert D Lee, Jr dan Ronald W Johnson, pengertian anggaran (budget) adalah “*A document or a collection of documents that refer to the financial condition of an organization (family, corporation, government), including information on revenues, expenditures, activities, and purposes or goals*”. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pengertian anggaran tersebut adalah dokumen yang menunjukkan kondisi atau keadaan keuangan suatu organisasi (keluarga, perusahaan, pemerintah) yang menyajikan informasi mengenai pendapatan, pengeluaran, aktivitas dan tujuan yang hendak dicapai.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan instrumen fiskal yang digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan bernegara, mewujudkan pembangunan, pemerataan, serta kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Pemerintah dalam melaksanakan APBN sebagai amanat rakyat, tentunya harus dikelola dengan tata kelola yang baik (*good governance*) agar keluaran/output yang dihasilkan atas program-program yang dituangkan dalam APBN tersebut dapat secara nyata dan optimal dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Postur APBN meliputi komponen anggaran pemerintah yang dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar, yaitu pendapatan negara dan hibah, belanja negara, dan pembiayaan. Pendapatan negara dan hibah terdiri dari penerimaan dalam negeri seperti pajak dan penerimaan bukan pajak, dan hibah,

sedangkan belanja negara terdiri atas belanja pemerintah pusat dan belanja untuk daerah yang pembiayaannya berasal dari pembiayaan dalam dan luar negeri. (Pramono, 2021)

Belanja Negara sangat penting untuk kehidupan masyarakat, maka penyerapan anggaran belanja negara diharapkan dilaksanakan dengan cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Penyerapan anggaran yang tidak maksimal dan lambat menyebabkan pelayanan publik pemerintah kepada masyarakat menjadi terhambat dan fungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal terutama untuk stimulus perekonomian menjadi tidak efektif. Di Indonesia, jika ditinjau dari sisi pengeluaran dalam anggaran pemerintah dialokasikan pada salah satunya untuk sektor pertahanan dengan penanggung jawab anggaran pada Kementerian Pertahanan yang terdiri dari belanja pegawai untuk pembayaran gaji militer dan personil, belanja barang untuk perawatan dan pemeliharaan serta belanja modal untuk modernisasi atau pembelian alutsista (Yusgiantoro, 2014).

Anggaran belanja pertahanan merupakan salah satu bagian dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Anggaran Pertahanan seringkali mencerminkan seberapa kuat pertahanan suatu negara terhadap ancaman dari pihak lain dan merupakan *anggaran publik* yang dialokasikan untuk berbagai macam keperluan yang berkaitan dengan pertahanan suatu negara. Anggaran Pertahanan juga memberi gambaran mengenai berapa banyak belanja pertahanan yang harus dikeluarkan untuk tahun berikutnya. Besaran anggaran belanja pertahanan suatu negara mencerminkan kemampuan suatu negara untuk membiayai kegiatan militernya. Tujuan dari diadakannya belanja pertahanan adalah untuk menyediakan pertahanan militer yang kuat bagi suatu negara dan menjaga keamanan bagi para warga negara (Buku Putih Pertahanan Republik Indonesia). Hal ini sejalan dengan *Adam Smith* dimana tugas melindungi masyarakat perlu

dilakukan oleh kekuatan pertahanan yang merupakan kewajiban pertama.

Secara konsep teoritis, APBN berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran pertahanan, sehingga jika APBN semakin tinggi maka Anggaran Pertahanan juga akan semakin besar secara mekanismenya. Sektor pertahanan masih menjadi prioritas anggaran pemerintah dimana anggaran Kementerian Pertahanan juga merupakan yang terbesar dibanding Kementerian/Lembaga lainnya dan meningkat setiap tahunnya. Namun, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan APBN yang pada akhirnya memberi pengaruh signifikan terhadap Anggaran Pertahanan adalah ditinjau dari faktor ekonomi dalam negeri yaitu pertumbuhan ekonomi (Smith, 1989). Salah satu persyaratan untuk meningkatkan pertumbuhan adalah dengan meningkatkan investasi dan jumlah tabungan swasta dan masyarakat. Beberapa faktor lain yang perlu diperhatikan sebelum menyatakan persetujuan untuk meningkatkan anggaran belanja militer yaitu, *Pertama*, kondisi keuangan pemerintah yang terbatas. Situasi ini memberatkan keuangan Negara sehingga peningkatan APBN sulit untuk direalisasikan karena keterbatasan dana dan pada akhirnya juga menghambat kenaikan anggaran pertahanan. *Kedua*, peningkatan anggaran pertahanan bisa menjadi kontra-produktif dengan program ekonomi pemerintah untuk meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi. Aspek lain yang perlu diperhatikan dalam perhitungan dan perencanaan belanja pertahanan adalah tekanan inflasi dalam tahun berjalan yang akan mempersulit pada akhirnya.

Perlu ditekan bahwa tingginya alokasi anggaran belanja pertahanan menunjukkan bahwa secara umum keunggulan kekuatan militer masih dianggap bernilai strategis dalam mencapai tujuan nasional. Penurunan anggaran pertahanan di sejumlah negara tertentu pada dasarnya merupakan suatu bentuk penyesuaian anggaran dan tidak

merepresentasikan menurunnya keinginan untuk pembangunan kekuatan. Lain halnya dengan negara-negara yang memiliki anggaran pertahanan yang besar sudah pasti memiliki APBN yang besar juga. Upaya peningkatan anggaran pertahanan harus dibarengi dengan peningkatan APBN dan sebaliknya.

Adapun kebijakan pemerintah dalam upaya peningkatan anggaran belanja yang pada akhirnya menaikkan anggaran pertahanan adalah:

- 1) Upaya pemerintahan dalam menyetatkan APBN dengan mengurangi defisit anggaran melalui peningkatan disiplin anggaran, pengurangan subsidi dan pinjaman luar negeri secara bertahap, peningkatan penerimaan pajak progresif yang adil dan jujur, serta penghematan pengeluaran.
- 2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen fiskal dan jika ditinjau secara teori, kebijakan pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal sebagai salah satu wujud intervensi pemerintah di dalam perekonomian. Perlu diperhatikan bahwa ekonomi pertahanan, termasuk belanja/pengeluaran pertahanan didalamnya memiliki keterkaitannya yang erat dengan sektor fiskal (Yusgiantoro, 2014). Upaya mengembangkan kebijakan fiskal dengan memperhatikan prinsip transparansi, disiplin, keadilan, efisiensi, efektivitas, untuk menambah penerimaan negara. Langkah utama yang diambil pemerintah untuk memantapkan kebijakan fiskal adalah meningkatkan pendapatan pemerintah dengan titik berat pada peningkatan penerimaan perpajakan (Boediono, 2003). Hingga saat ini, pajak masih merupakan andalan utama pemerintah untuk meningkatkan penerimaan. Anggaran pertahanan di banyak negara juga dibiayai oleh pajak.
- 3) Pajak melalui fungsinya sebagai fungsi anggaran atau Penerimaan (*budgetair*) dimana pajak sebagai salah satu sumber dana yang digunakan pemerintah dan bermanfaat untuk membiayai tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Upaya optimalisasi penerimaan negara dengan kebijakan mendorong optimalisasi penerimaan pajak sehingga rasio pajak per PDB semakin meningkat. Pada saat PDB meningkat maka penerimaan perpajakan akan mengalami peningkatan yang lebih besar. Secara mekanismenya, peningkatan PDB akan mempengaruhi pola konsumsi penduduk yang secara bersamaan menyebabkan peningkatan penerimaan pajak. Dengan kata lain, peningkatan pendapatan per kapita akan selalu diikuti dengan peningkatan kemampuan untuk membayar pajak, sehingga penerimaan perpajakan akan bertambah. Surplus ekonomi yang sebagai dikontribusikan oleh negara dalam bentuk pajak pada akhirnya akan digunakan negara untuk membiayai anggaran pertahanan.
- 4) Upaya menstimulasi perekonomian dengan tetap mengendalikan defisit dalam batas aman dan mengendalikan keseimbangan primer. Jika Keseimbangan primer bernilai negatif jika total pendapatan negara lebih kecil daripada belanja negara di luar pembayaran bunga utang dan sebaliknya. Kondisi fiskal yang sehat juga didukung dengan penurunan defisit keseimbangan primer. Menjaga target defisit APBN dengan koordinasi yang lebih erat antara unit pengelola penerimaan, pengeluaran

dan utang. Defisit anggaran negara adalah selisih antara penerimaan negara dan pengeluarannya yang cenderung negatif, dalam arti bahwa pengeluaran negara lebih besar dari penerimaannya. Adapun upaya dalam pemenuhan defisit APBN dilakukan melalui strategi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman luar negeri. Pinjaman luar negeri didasarkan pada perkiraan yang realistis, disesuaikan dengan keadaan keuangan negara serta mempertimbangkan berbagai hal, seperti sumber-sumber pinjaman dan persyaratan hutang. Pinjaman luar negeri mencakup setiap penerimaan negara, baik dalam bentuk devisa maupun dalam bentuk barang atau jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu, serta dana yang dapat cepat dicairkan. Perlu diperhatikan bahwa pinjaman luar negeri tidak direkomendasikan sebab pada dasarnya negara berupaya untuk mengurangi beban pinjaman bahkan penjadwalan kembali pinjaman yang sudah jatuh tempo. Pinjaman luar negeri juga memberi efek pada tingkat suku bunga yang menaik sehingga terjadi kelangkaan pada pasar uang.

- 5) Peningkatan kualitas belanja negara tersebut melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja negara melalui perbaikan struktur belanja negara agar menjadi lebih produktif serta efisien dalam mendukung pencapaian target pembangunan nasional secara optimal. Hal ini tercermin dari belanja yang dikategorikan *sustainable* apabila secara agregat sejalan dengan kerangka ekonomi makro jangka menengah yang menghasilkan strategi defisit/surplus dan utang yang berkelanjutan. Belanja negara dikatakan efisien apabila mampu mencapai hasil-hasil prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dengan alokasi belanja

yang tidak boros dan berhasil mencapai target-target program pembangunan nasional yang telah ditetapkan.

- 6) Penerimaan negara diusahakan terutama bersumber dari dalam negeri, oleh karena sumber dari luar negeri sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal dan dapat mengurangi kemandirian dalam pembiayaan pembangunan.
- 7) Upaya pengurangan dalam pemberian subsidi. Subsidi dapat menyebabkan alokasi sumber-sumber ekonomi secara tidak efisien sebab sering terjadi penerima akhir bukan dari golongan berpendapatan rendah. Fenomena lain adalah adanya beban subsidi energi dan non-energi menekan belanja negara sebab beban subsidi energi merupakan yang terbesar dibandingkan belanja yang lain. Dalam rangka penyehatan APBN, mengurangi subsidi energi adalah langkah yang tepat sehingga dapat menambah porsi anggaran dan belanja negara.

#### **Pengaruh Produk Domestik Bruto Terhadap Anggaran Pertahanan**

Berdasarkan pada hasil estimasi secara parsial untuk menjawab pertanyaan empiris selanjutnya terhadap penelitian variabel Anggaran Pertahanan tahun 2010-2020 bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Anggaran Pertahanan. Probabilitas t-hitung sebesar  $0.0475 < \alpha$ ,  $0.0475 < 0.05$ ; memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Anggaran Pertahanan.

Dalam menjalankan fungsi dan aktivitasnya, pemerintah melakukan kegiatan pengeluaran untuk membiayai semua aktivitasnya. Dana pengeluaran pemerintah tersebut dapat dipenuhi dari pendapatan nasional. Salah satu indikator alokasi yang efisien secara makro adalah nilai output nasional atau biasa disebut dengan pendapatan nasional yang dihasilkan sebuah perekonomian pada periode tertentu. Pendapatan nasional adalah dana yang diperoleh pemerintah yang

berasal dari berbagai sumber, baik dalam bentuk penerimaan maupun hutang, dan digunakan untuk mendanai seluruh pengeluaran dan belanja pemerintah. Secara harafiah, prinsip daripada pendapatan nasional mewakili konsep Produk Domestik Bruto (*Gross domestic Product/GDP*). Secara konsep, Produk Domestik Bruto (PDB) mengukur nilai hasil produksi, pendapatan, dan atau pengeluaran nasional suatu perekonomian (Kusnendi, 2002). Melalui PDB maka dapat diukur beberapa hal pada waktu bersamaan seperti total pendapatan masyarakat dalam suatu perekonomian dan total pembelanjaan negara untuk membeli barang dan jasa hasil dari perekonomian

PDB diyakini sebagai indikator ekonomi terbaik dalam menilai perkembangan ekonomi dan mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara dimana semakin tinggi PDB suatu negara maka dapat dikatakan bahwa semakin bagus pula kinerja ekonomi negara tersebut. Selain itu, indikator PDB umumnya digunakan untuk mengukur kinerja dari kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah suatu negara dalam rangka meningkatkan produktivitas pada kegiatan ekonomi di suatu negara (Yusgiantoro, 2014).

PDB memiliki pengaruh dan keterkaitan terhadap pendapatan negara, dimana semakin tinggi tingkat pendapatan, PDB juga akan semakin meningkat. Dalam teori pembangunan ekonomi diketahui bahwa PDB dan belanja negara mempunyai hubungan timbal balik yang positif. Jika ditinjau pada konteks ekonomi makro, pengeluaran/belanja pemerintah adalah salah satu variabel pembentuk Produk Domestik Bruto PDB. Dengan peningkatan PDB maka pemerintah semakin banyak melakukan pembangunan dan kebijakan lainnya untuk mensejahterakan masyarakat yang tercermin dari peningkatan anggaran belanja.

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengendalikan dinamika persenjataan

adalah melihat besaran anggaran pertahanan suatu negara. Belanja pertahanan memiliki keterkaitan yang kuat dengan PDB dan menjadi ukuran yang baik dalam menunjukkan besarnya beban pertahanan bagi perekonomian negara. Anggaran pertahanan adalah cerminan seberapa kuat suatu negara dalam membangun kekuatan militernya. Dengan kondisi perekonomian yang kuat, maka kekuatan militernya akan kuat dengan didukung oleh jumlah anggaran yang memadai juga.

Persoalan yang kerap terjadi adalah tingkat relatif PDB untuk suatu negara berbeda dengan dengan negara lain, karena anggaran pertahanan suatu negara umumnya memuat sektor pembiayaan yang berbeda dengan negara lain. Setiap tahun diduga terdapat lebih dari 1,5 triliun USD atau 2.7% dari PDB dunia digunakan untuk belanja pertahanan (pembelian alutsista,dll). Oleh sebab itu, upaya yang dilakukan oleh pemerintah guna peningkatan PDB adalah melalui kebijakan-kebijakan ekonomi, seperti:

- 1) PDB berpengaruh utama kepada pendapatan negara yang berasal dari penerimaan pajak. Oleh sebab itu, upaya peningkatan penerimaan pajak lebih di maksimalkan.
- 2) pengelolaan kebijakan makro dan mikroekonomi secara terkoordinasi dan sinergis guna menentukan tingkat suku bunga wajar, tingkat inflasi terkendali, tingkat kurs rupiah yang stabil dan realistis, penyediaan kebutuhan pokok terutama sandang dan pangan rakyat, menyediakan fasilitas publik yang memadai dan harga terjangkau, serta memperlancar perizinan yang transparan, mudah, murah, dan cepat. Perlu diperhatikan bahwa tingkat suku bunga adalah alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mengendalikan tingkat harga, dimana ketika tingkat harga tinggi dimana jumlah uang yang beredar di masyarakat banyak sehingga konsumsi masyarakat tinggi akan diantisipasi oleh



- pemerintah dengan menetapkan suku bunga yang tinggi.
- 3) pemerintah mengoptimalkan perannya dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar, menghilangkan seluruh hambatan yang mengganggu mekanisme pasar melalui regulasi, layanan publik, subsidi dan insentif secara transparan dan diatur dengan undang-undang.
  - 4) Mengembangkan kebijakan industri, perdagangan dan investasi guna meningkatkan daya saing global dengan membuka aksesibilitas yang sama terhadap kesempatan kerja dan berusaha bagi segenap rakyat dan seluruh daerah melalui keunggulan kompetitif terutama berbasis keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia serta menghapus segala bentuk perlakuan diskriminatif dan hambatan
  - 5) Memberdayakan pengusaha kecil menengah dan koperasi agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya melalui pembangunan sistem ekonomi kerakyatan
  - 6) penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
  - 7) peningkatan jumlah ekspor dan impor guna meningkatkan devisa negara. Namun, upaya peningkatan jumlah ekspor sangat perlu diperhatikan sehubungan dalam upaya peningkatan penerimaan negara melalui pinjaman luar negeri menimbulkan kewajiban pembayaran kembali di maa mendatang, sehingga harus dilakukan dengan hati-hati. Ekspor terdiri dari migas dan non-migas, namun ekspor migas tidak dapat diharapkan dalam jangka panjang terutama karena adanya ketidakpastian harga minyak di pasaran internasional, dan dalam kenyataannya migas merupakan sumber-sumber ekonomi yang tidak dapat diperbaharui {non-renew-able reseources). Ekspor non-migas terutama padat karya yang meningkat dipercaya mampu mendukung penerimaan dalam negeri, dengan keuntungannya bagi negara diantaranya, perluasan memperluas kesempatan kerja, pasar, peningkatan mutu dan efisiensi barang-barang ekspor, perdagangan luar negeri Indonesia menjadi lebih kuat terhadap pengaruh-pengaruh eksternal, sehingga kestabilan ekonomi dalam negeri lebih terjamin.
  - 8) Peningkatan investasi akan meningkatkan laju pertumbuhan sehingga PDB akan bertambah. Dana investasi diperoleh dari tabungan pemerintah dan masyarakat. Investasi yang dilakukan oleh pemerintah (baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) dalam rangka penyediaan barang publik untuk melayani dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat dan tidak bertujuan untuk mencari laba. Sumber dana investasi juga berasal dari investasi asing langsung (PMA) yang juga memberi pengaruh dalam peningkatan perekonomian Indonesia.

### **Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Anggaran Pertahanan**

Berdasarkan pada hasil estimasi secara parsial untuk menjawab pertanyaan empiris terhadap penelitian variabel Anggaran Pertahanan tahun 2010-2020 bahwa Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Anggaran Pertahanan. Hasil estimasi ini tidak sesuai dengan hipotesis awal, yang dibuktikan dengan Probabilitas t-hitung sebesar  $0.0063 < \alpha$  ( $0.0063 < 0.05$ ), memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Anggaran Pertahanan.

Ekonomi merupakan salah satu pondasi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi telah menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan suatu Negara.

Perekonomian akan mengalami pertumbuhan jika nilai nyata produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada nilai nyata produksi pada tahun yang sebelumnya. Definisi pertumbuhan ekonomi menurut Sukirno (2013) adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa diproduksi dalam masyarakat bertambah.

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses kenaikan output perkapita. Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat meningkat. Disisi lain, pertumbuhan ekonomi merupakan fungsi dari pengeluaran pemerintah. Kebijakan belanja atau pengeluaran pemerintah terbukti secara empiris memiliki pengaruh atau dampak terhadap pertumbuhan ekonomi.

Teori Klasik Keynes membahas pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh peran pemerintah, beranggapan bahwa campur tangan pemerintah dalam ekonomi menentukan pembangunan ekonomi dapat berjalan maksimal. Implikasi pandangan Keynes adalah bahwa untuk menjamin pertumbuhan yang stabil diperlukan peranan pemerintah dalam pengelolaan perekonomian baik melalui kebijakan moneter (tingkat suku bunga dan jumlah uang beredar) maupun kebijakan fiskal (perpajakan dan belanja pemerintah (Sukirno, 2006). Aliran Keynesian berpandangan bahwa meningkatnya pengeluaran pemerintah akan mendorong peningkatan permintaan berbagai barang dan jasa yang diproduksi perekonomian secara agregat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, belanja negara termasuk di dalamnya belanja pertahanan menjadi salah satu alat kebijakan yang penting dan ideal digunakan oleh pemerintah dalam upaya menciptakan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Sebagai contoh adalah kasus perang yang terjadi di negara konflik atau negara-negara penghasil alutsista utama dan terbesar, terjadi peningkatan anggaran pertahanan salah satunya dalam bentuk

investasi pada industri pertahanan. Industri pertahanan secara tidak langsung memberi keuntungan dengan meningkatkannya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional. Namun, di Indonesia, industri pertahanan belum mampu memberikan keuntungan dalam aspek ekonomi walaupun setiap tahun terjadi peningkatan anggaran setiap tahunnya. Kenaikan anggaran hanya meningkatkan belanja tetapi tidak disertai dengan pengembalian yang surplus.

Namun, dalam Hukum Wagner, yaitu hukum meningkatnya ekspansi aktifitas publik, dimana Wagner menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya yang mempengaruhi pengeluaran belanja pemerintah dimana dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran belanja pemerintah akan meningkat. Hal ini sesuai dengan *ambition hypotesis* oleh Castillo (2001) yang menyatakan bahwa anggaran pertahanan memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi. Negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang meningkat berambisi untuk memperbesar belanja pertahanannya, dengan kata lain semakin besar kekuatan dan kekayaan ekonomi suatu negara maka akan semakin besar pengeluaran pertahanannya. Negara akan mengejar peningkatan ekonomi dan kekuatan pertahanan merupakan tujuan yang tertinggi dari negara.

Pemerintah dalam kebijakannya untuk menaikkan atau meningkatkan anggaran pertahanan sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi dalam negeri yaitu pertumbuhan ekonomi (Smith, 1989). Upaya percepatan pertumbuhan ekonomi sangat membutuhkan kebijakan ekonomi dan peran pemerintah dalam mengatur dan menjaga kestabilan perekonomian negara. Indikator pertumbuhan ekonomi berguna untuk mengetahui laju pertumbuhan output dalam suatu perekonomian yang mencerminkan kinerja perekonomian. Perkembangan ekonomi suatu negara dapat

diukur melalui pertumbuhan ekonomi negara tersebut, yang menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam satu tahun (BPS, 2018). Berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, diantaranya:

- 1) Akumulasi modal yang tercermin dari upaya peningkatan investasi dan jumlah tabungan swasta dan masyarakat. Modigliani-Miller menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju dan berkembang ditentukan oleh pertumbuhan investasi di negara tersebut. Namun, pertumbuhan investasi seringkali tidak optimal karena adanya hambatan pembiayaan yang akan mempengaruhi keputusan perusahaan melakukan investasi. Salah satu teori pembangunan yang sampai saat ini masih dipakai, dan merupakan perluasan dari analisis Keynes adalah teori dari Evsey Domar dan Roy Harrod. Kedua ahli ekonomi ini, yang bekerja secara terpisah, mencapai kesimpulan yang sama yakni bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingginya tabungan dan investasi. Jika tabungan dan investasi rendah, pertumbuhan ekonomi masyarakat negara tersebut juga akan rendah. Pentingnya investasi (jangka panjang) di dalam proses pertumbuhan ekonomi karena aspek investasi mempunyai peran ganda, yaitu investasi menciptakan pendapatan dan memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok modal
- 2) Upaya dalam menstabilkan tingkat suku bunga sebab tingkat suku bunga yang tinggi akan membatasi kredit dan pada akhirnya mengurangi pertumbuhan ekonomi.
- 3) Peningkatan industri pada karya dan berbagai aspek perekonomian negara yang diikuti oleh peningkatan angkatan kerja produktif, kemajuan teknologi dan ekspor.

Kemajuan teknologi memberikan cara atau metode terbaru dalam suatu pekerjaan. Hal ini tercermin pada negara maju yang memiliki industri besar dengan teknologi mutakhir. Teknologi yang mutakhir erat kaitannya dengan pendapatan dan kesejahteraan penduduk. Semakin banyak barang dan jasa yang dihasilkan dan didukung oleh teknologi yang mutakhir dan didukung oleh pendistribusian yang lancar maka distribusi pendapatan per kapita suatu negara akan merata sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat.

- 4) Pertumbuhan konsumsi rumah tangga diharapkan tiap tahun meningkat. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang stagnan sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Konsumsi rumah tangga termasuk diantaranya daya beli masyarakat dalam membelanjakan uangnya.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta komparasi dari hasil penelitian terdahulu, peneliti menemukan bahwa bagaimana hubungan variabilitas yang mempengaruhi kenaikan anggaran pertahanan. Anggaran belanja pertahanan merupakan salah satu bagian dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Anggaran pertahanan seringkali mencerminkan seberapa kuat pertahanan suatu negara terhadap ancaman dari pihak lain dan merupakan anggaran publik yang dialokasikan untuk berbagai macam keperluan yang berkaitan dengan pertahanan suatu negara. Anggaran pertahanan juga memberi gambaran mengenai berapa banyak belanja pertahanan yang harus dikeluarkan untuk tahun berikutnya. Secara konsep teoritis, APBN berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran pertahanan, sehingga jika apbn semakin tinggi maka anggaran pertahanan juga akan semakin besar secara mekanismenya.

Jika dilihat dari sisi bahwa produk domestik bruto (PDB) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap anggaran pertahanan. Pdb memiliki pengaruh dan keterkaitan terhadap pendapatan negara, dimana semakin tinggi tingkat pendapatan, pdb juga akan semakin meningkat. Dalam teori pembangunan ekonomi diketahui bahwa pdb dan belanja negara mempunyai hubungan timbal balik yang positif. Jika ditinjau pada konteks ekonomi makro, pengeluaran/belanja pemerintah adalah salah satu variabel pembentuk produk domestik bruto pdb. Belanja pertahanan memiliki keterkaitan yang kuat dengan pdb dan menjadi ukuran yang baik dalam menunjukkan besarnya beban pertahanan bagi perekonomian negara. Anggaran pertahanan adalah cerminan seberapa kuat suatu negara dalam membangun kekuatan militernya. Dengan kondisi perekonomian yang kuat, maka kekuatan militernya akan kuat dengan didukung oleh jumlah anggaran yang memadai juga.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi, terdapat pertentangan baik dari hasil estimasi maupun teori., dimana berdasarkan hasil estimasi pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap anggaran pertahanan. Aliran keynesian berpandangan bahwa meningkatnya pengeluaran pemerintah akan mendorong peningkatan permintaan berbagai barang dan jasa yang diproduksi perekonomian secara agregat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, belanja negara termasuk di dalamnya belanja pertahanan menjadi salah satu alat kebijakan yang penting dan ideal digunakan oleh pemerintah dalam upaya menciptakan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Namun, dalam hukum wagner, yaitu hukum meningkatnya ekspansi aktifitas publik, dimana wagner menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya yang mempengaruhi pengeluaran belanja pemerintah dimana dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara

relatif pengeluaran belanja pemerintah akan meningkat. Hal ini sesuai dengan *ambition hypothesis* oleh castillo (2001) yang menyatakan bahwa anggaran pertahanan memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi. Negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang meningkat berambisi untuk memperbesar belanja pertahanannya, dengan kata lain semakin besar kekuatan dan kekayaan ekonomi suatu negara maka akan semakin besar pengeluaran pertahanannya. Negara akan mengejar peningkatan ekonomi dan kekuatan pertahanan merupakan tujuan yang tertinggi dari negara. Guna meningkatkan anggaran pertahanan, berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah diantaranya:

- a. Peningkatan disiplin anggaran, pengurangan subsidi dan pinjaman luar negeri secara bertahap, peningkatan penerimaan pajak progresif yang adil dan jujur, serta penghematan pengeluaran.
- b. Memantapkan kebijakan fiskal adalah meningkatkan pendapatan pemerintah dengan titik berat pada peningkatan penerimaan perpajakan
- c. Upaya menstimulasi perekonomian dengan tetap mengendalikan defisit dalam batas aman dan mengendalikan keseimbangan primer. Adapun upaya dalam pemenuhan defisit apbn dilakukan melalui strategi penerbitan surat berharga negara (sbn) dan pinjaman luar negeri
- d. Upaya pengurangan dalam pemberian subsidi.
- e. Pengelolaan kebijakan makro dan mikroekonomi secara terkoordinasi dan sinergis guna menentukan tingkat suku bunga wajar, tingkat inflasi terkendali, tingkat kurs rupiah yang stabil dan realistis. Tingkat suku bunga yang tinggi akan membatasi kredit dan pada akhirnya mengurangi pertumbuhan ekonomi.
- f. Mengembangkan kebijakan industri, perdagangan dan investasi guna meningkatkan daya saing global

- g. Peningkatan jumlah ekspor dan impor guna meningkatkan devisa negara
- h. Upaya peningkatan investasi yang kan meningkatkan laju pertumbuhan sehingga pdb akan bertambah. Dana investasi diperoleh dari tabungan pemerintah dan masyarakat
- i. Peningkatan industri pada karya dan berbagai aspek perekonomian negara yang diikuti oleh peningkatan angkatan kerja produktif, kemajuan teknologi dan ekspor
- j. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga diharapkan tiap tahun meningkat. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang stagnan sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Konsumsi rumah tangga termasuk diantaranya daya beli masyarakat dalam membelanjakan uangnya.
- [4] Ashley J. Tellis, Janice Bially, Christopher Layne dan Melissa McPherson, *Op. cit.*, hal. 137
- [5] Atmadja, Arifin P. Soeria. 2009. *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum, Teori, Kritik dan Praktik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada Deger, Saadet Dan Somnath Sen. 1995. *Military Expenditure And Developing Countries*.
- [6] Dipua, A., Harahap, N., Puspitawati, D., Aminuddin, F., Prakoso, L. Y., Brawijaya, U., & Pertahanan, U. (2021). Sea Defense Strategy the Indonesian Navy in Dealing with the South China Sea Conflict. *ITALIENISCH*, 11(2), 120–126.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.1115/italienisch.v11i2.103>
- [7] Ekonomi Dan Pengeluaran Militer Di Indonesia Tahun 1981-2018. Bogor: Elsevier Science B. V: Handbook Of Defense Economics, Volume 1.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agus Damar Jaya, S. . ., Lukman Yudho Prakoso, Purwanto ., Dohar Sianturi, Resmanto Widodo Putro, & Agus Damar Jaya Lukman Yudho Prakoso, Purwanto ., Dohar Sianturi, Resmanto Widodo Putro, S. (2020). Sea Defense Strategy of Anti-Submarine on We Island. *International Affairs Global Strategy*, 81(Defense STrategy), 15–20.  
<https://doi.org/10.7176/IAGS/81-03>
- [2] Anggoro, Kusnanto. 2005. *Makalah Pengantar dalam Diskusi Publik dengan Tema “Manajemen Pertahanan dan Keamanan” : Pengelolaan Sumber Daya Pertahanan (dan Keamanan) Negara*. Jakarta: Propatria Institute
- [3] APBN KITA 2018 Kinerja dan Fakta Edisi Januari 2019 Kementrian Keuangan Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 LN Nomor 5 Tahun 2004 TLN Nomor 4355 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2012-2019
- [8] Gujarati, D.N. 2003. *Dasar – Dasar Ekonometrika*. Jakarta: Erlangga
- [9] Hermawan, Asep. 2004. *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*. Jakarta: PT Gramedia Widia Sarana Indonesia Jakarta: Kementerian Pertahanan Indonesia. Jakarta: Universitas Pertahanan Indonesia
- [10] Jhingan M.L., (2004). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Jakarta: Rajawali Press Kementerian Pertahanan Indonesia. (2015). *Buku Postur Pertahanan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Indonesia.
- [11] Junaidi, M. E., Prakoso, L. Y., Eka, M., & Yudho, L. (2021). Pancasila as the Basis for Indonesia’s Universal Defense. *Journal of Social and Political Sciences*, 4(2), 148–154.  
<https://doi.org/10.31014/aior.1991.04.02.283>
- [12] Kasih Prihantoro Zakariya, Lukman Yudho Prakoso, Ratna Damayanti, A. D.

- (2019). Public Policy Analysis of Defense Areas and Defense Area Plan In Grati Pasuruan. *The 3th Indonesia International Defense Science Seminar*, 2(Universitas Pertahanan), 483–490.
- [13] Kementerian Pertahanan Indonesia. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Jakarta:
- [14] Lincoln, A. (2004). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Penerbit STIE Ilmu Ekonomi
- [15] Listiyono, Y., Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2021). Strategi Pertahanan Laut dalam Pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia untuk Mewujudkan Keamanan Maritim dan Mempertahankan Kedaulatan Indonesia. *Strategi Pertahanan Laut*, 5(3), 103–116.
- [16] Lukman Yudho Prakoso 1 Gerald Theodorus L. Toruan 3 , Dohar Sianturi 4, and Ratna Damayanti 5, S. 2. (2019). Defence State Model for Facing Threats of Radicalism and Terrorism in Indonesian Higher Education–. *The 3th Indonesia International Defense Science Seminar*, 2(BELA NEGARA).
- [17] Mangkosoebroto, Guritno. (2001). *Ekonomi Publik Edisi ketiga*, Yogyakarta: BPFU UGM Putri, Yuaninda Laksmi Yuli Handoyo. 2020. *Studi Kausalitas Pertumbuhan Fakultas Ekonomi Universitas Jember*. Group: Indonesia. Penerbit Erlangga
- [18] Prakoso, L. Y., Suhirwan, Sianturi, D., Adriyanto, A., & Damayanti, R. (2019). Implementasi kebijakan Pokok-Pokok Penyelenggaraan Tugas Bantuan Tentara Nasional Indonesia dalam Menanggulangi Bencana Alam. *Proceeding ICDM 2019 Volume 2*, 2(kebencanaan).
- [19] Pramono, A.: B., & editor, L. Y. P. (2021). *Politics and national defense*. Publisher : CV. Aksara Global Akademia,.
- [20] Sanusi, Anwar. 2011. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat
- [21] Setaidji, Agus. 2020. *Ekonomi Pertahanan: Menghadapi Perang Generasi Keenam*.
- [22] soerarlo, S. prasojo, & Prakoso, L. Y. (2021). kebijakan publik KOMUNIKASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA (Studi Deskriptif Kualitatif Negosiasi Kebijakan Revitalisasi Trotoar Pemerintah Daerah di Jalan Kemang Raya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta). *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(3), 955–964.
- [23] Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta Sukirno, Sadono. (2006). *Ekonomi Pembangunan Edisi Kedua*. Kencana Prenada Media
- [24] Suhirwan . Wuri Retno Martani, L. Y. P., Suhirwan ., Lukman Yudho Prakoso, & Wuri Retno Martani. (2020). Indonesian Navy as a Maritime Command Center Sea Defense Strategy. *Public Policy Admintration Research*, 10(sea defense strategy), 33–39. <https://doi.org/10.7176/PPAR/10-2-03>
- [25] Suparmoko, M. (2011). *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik*. Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada: Yogyakarta.
- [26] Thomas W. Smith, *History and International Relations*, London & New York: Routledge, 1999, hal. 135.
- [27] Todaro, Michael, P. (2008). *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesembilan*. Jilid 1, Jakarta: a. Universitas Pertahanan.
- [28] Wardhono, Adhitya. 2004. *Mengenal Ekonometrika Teori dan Aplikasi. Edisi Pertama*. YKPN
- [29] Yusgiantoro, Purnomo. 2014. *Ekonomi Pertahanan*. Jakarta: PT Gramedia Media Pustaka